

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 21
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2021
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)
Hadir : A. 37 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan
Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris
Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Direktur
Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian
Kelautan dan Perikanan);
4. Dr. TB Haeru Rahayu (Direktur Jenderal
Perikanan Budidaya sekaligus Plt. Direktur
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian
Kelautan dan Perikanan);
5. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
6. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Fatah Setiawan Topobroto (Direktur Utama Perum
Perikanan Indonesia);

8. Sigit Muhartono Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
9. Achmad Ardianto (Direktur Utama PT Garam (Persero) hadir secara virtual.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2021, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Pagu Anggaran Belanja Indikatif tahun 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, sebesar **Rp6.122.087.397.000,00** (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp519.107.535.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp87.424.408.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp770.091.758.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp1.143.447.870.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp384.597.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp384.340.414.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pendalaman terhadap rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur, dan akuntabel dengan prioritas melalui bimbingan teknis, program padat karya, dan penyuluhan bagi seluruh nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, dengan memperhatikan kultur daerah, kearifan lokal serta potensi perikanan dan kelautan per-wilayah, serta melakukan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan secara bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang berjumlah 1.989 orang untuk mengusulkan secara bertahap menjadi Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu kepada tata aturan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan inventarisasi kepemilikan aset tanah bangunan secara tertib berdasarkan legal hukum, baik yang bersifat sewa ataupun kontrak kerjasama yang dilakukan lintas instansi, sehingga kepemilikan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dampak kemajuan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan program dan kegiatan anggaran tahun 2022 secara terperinci serta jawaban tertulis, untuk kemudian diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Kerja Hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Sakti Wahyu Trenggono

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151